

Gender Dalam Lembaga Kemahasiswaan

Sri Banun Juwita Hartati HM¹, Faridah ², Andi Wahed³

Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

E-mail korespondensi: banunjuwita@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
gender, pendidikan tinggi, lembaga kemahasiswaan

Keywords:
gender, higher education, students' organizations

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang gender dan lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang praktik kesetaraan gender di lembaga kemahasiswaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga kemahasiswaan yang masih aktif dan demisioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik berdasarkan isu yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam menduduki jabatan didalam organisasi sesuai dengan komptensi dan aturan organisasi. Meskipun demikian, terdapat persepsi bahwa laki-laki dianggap lebih pantas dalam menduduki jabatan sebagai ketua atau koordinator karena dianggap memiliki ketegasan dalam pengambilan keputusan, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil resiko. Di sisi lain, perempuan dianggap lebih pantas menduduki jabatan sekretaris dan bendahara karena dianggap sebagai sosok yang lebih rajin, teliti, rapi, dan terampil dalam mengurus keuangan. Hal ini menjelaskan mengapa dengan jumlah perempuan yang lebih banyak, tetapi yang menjadi ketua selalu laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai sekretaris dan bendahara.

ABSTRACT

Abstract: This study examines gender and student institutions in higher education. The purpose of this study is to analyze the practice of gender equality in student institutions. The approach used in this research is qualitative. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. The source of data in this research is the management of student institutions who are still active and are still inactive. Data analysis is carried out using thematic analysis based on the issues that arise. The results of the study indicate that men and women have equal opportunities in occupying positions within the organization in accordance with the competence and rules of the organization. However, there is a perception that men are considered more appropriate in occupying the position as chairman or coordinator because they are considered to have firmness in decision making, have leadership qualities, and are willing to take risks. On the other hand, women are considered more worthy of the positions of secretary and treasurer because they are considered to be more diligent, thorough, neat, and skilled in managing finances. This explains why the number of women is greater, but the chairperson is always a man and a woman is placed as secretary and treasurer.

© 2022 Sri Banun Juwita Hartati HM, Faridah, Andi Wahed
Under The License CC-BY SA 4.0

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang

mencatat mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah “kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Selain itu perguruan tinggi juga perlu menyiapkan organisasi mahasiswa sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika. Perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sebagai mana yang diatur dalam surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan dapat dianalogikan sebagai laboratorium kehidupan bermasyarakat. Melalui wadah inilah mahasiswa berkesempatan untuk mengenal, mempelajari, mensosialisasikan ataupun mengujicobakan berbagai konsep dan tata kehidupan sosial yang baik. Melalui wadah kegiatan mahasiswa ini juga, usaha mencetak generasi muda sebagai pelopor dan pembaharu dalam mengurai beragam permasalahan kehidupan sosial di masyarakat dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, organisasi kemahasiswaan perlu menginternalisasi konsep kesetaraan gender dalam siklus kehidupan keorganisasianya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan Kesetaraan Gender di bidang: kewarganegaraan; pendidikan; ketenagakerjaan; ekonomi; kesehatan; administrasi dan kependudukan; perkawinan; hukum; politik dan pemerintahan; lingkungan hidup; sosial dan budaya; dan komunikasi dan informasi.

Walaupun aturan mengenai kesetaraan gender tersebut sudah ada, namun peran wanita dalam pendidikan dan berorganisasi masih sangat minim, padahal kesempatan bagi kaum perempuan sudah sangat terbuka lebar dalam ranah pendidikan dan organisasi. Tetapi untuk jabatan sebagai seorang pemimpin khususnya di bidang organisasi di kalangan mahasiswa masih didominasi oleh sosok laki-laki. Beberapa organisasi di FIP yang terdiri dari organisasi MAPERWA, BEM, MADIPALA, AKSARA, SCRN, HIMA, dan HMJ, yang notabene pemimpin dari masing-masing organisasi mahasiswa tersebut di dominasi oleh seorang laki-laki. Hal ini masih sangat kontras dengan berbagai aturan mengenai konsep kesetaraan gender, di mana seorang perempuan masih berkutat pada ranah urusan rumah tangga (sekretaris, bendahara) dan bukan sebagai seorang pemimpin (ketua/kepala).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilapangan bahwa jumlah data mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 206 orang, laki-laki berjumlah 16,02%, perempuan berjumlah 83,98%, sedangkan yang tergabung dalam keanggotaan HIMA AP FIP UNM Tahun akademik 2020/2021 berjumlah 74 orang, dimana jumlah laki-laki sebanyak 29,72%, dan jumlah perempuan sebanyak 70,27%, dan ditemukan dalam struktur kepengurusan HIMA AP FIP UNM Perempuan lebih banyak mendominasi daripada laki-laki pada pengurus inti kelembagaan dan yang menempati posisi ketua dan ketua bidang adalah laki-laki sedangkan perempuan menempati posisi sebagai sekretaris dan bendahara. Adapun aturan lembaga yang membahas mengenai persyaratan menjadi pengurus adalah: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Loyal terhadap organisasi, Bersedia aktif menjadi pengurus, Tidak sedang kena sanksi akademik, Memiliki jiwa kepemimpinan, Lulus LDKM, Bersedia menaati AD/ART, arah kebijakan organisasi, arah juklak dan rekomendasi MUBES HIMA AP FIP UNM, Tidak cacat organisasi, Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif AP FIP UNM, Tidak terlibat politik praktis, Minimal semester 2 Maksimal semester 6.

Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang Gender dan Lembaga Kemahasiswaan, Wujud Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Rasa keingintahuan peneliti tersebut ditungkan melalui penelitian ilmiah yang berjudul Gender dan Lembaga Kemahasiswaan Di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena atau peristiwa yang dialami civitas mahasiswa fakultas ilmu pendidikan secara sistematis.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, yang beralamat di Jl. Tamalate 1, Tidung, Rappocini, Karunjung, Kec.Rapopcini, Kota Makassar. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang dan pernah menjadi pengurus lembaga. Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisi dengan menggunakan analisis tematik berdasarkan isu yang muncul.

HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam mempermudah untuk memahami lokasi penelitian yang menjadi tempat peneliti memperoleh data dilapangan, maka berikut dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian:

b. Sejarah Singkat Lembaga Kemahasiswaan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Lembaga Kemahasiswaan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar diberi nama Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (HIMA AP FIP UNM). Lembaga tersebut didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Lembaga tersebut bertempat di kampus Tidung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Lembaga tersebut berkedudukan di tingkat Jurusan yang merupakan kelengkapan non struktural dari Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

c. Keadaan Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Mahasiswa merupakan seorang pemuda atau terpelajar yang melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif selalu lahir dari pola pikiran para mahasiswa. Mahasiswa berperan lebih, tidak hanya bertanggung jawab sebagai kaum akademis, tetapi diluar itu wajib memikirkan dan mengembangkan tujuan bangsa. mahasiswa pun seorang intelektual yang berfikir kritis dalam hal mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Adapun jumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan di setiap jurusan adalah sebagai berikut pada angkatan tahun 2018 jumlah mahasiswa administrasi pendidikan 451 orang, pada angkatan tahun 2019 jumlah mahasiswa administrasi pendidikan 551 orang.

d. Keadaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Jurusan Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan berdiri pada 11 juli 1996 dengan SK penyelenggaraan 8234/D/T/K-N/2011, dengan jumlah mahasiswa pada semester ganjil 2020 berjumlah 451, dalam administrasi pendidikan ada sebuah organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan dimana yang menjadi pengurus HIMA AP tersebut adalah angkatan 2018 dan 2019.

Mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 berjumlah 206 orang, laki-laki berjumlah 16,02%, perempuan berjumlah 83,98%, sedangkan yang tergabung dalam keanggotaan HIMA AP FIP UNM Tahun akademik 2020/2021 berjumlah 74 orang, dimana jumlah laki-laki sebanyak 29,72%, dan jumlah perempuan sebanyak 70,27%, dan ditemukan dalam struktur kepengurusan HIMA AP FIP UNM Perempuan lebih banyak mendominasi daripada laki-laki pada pengurus inti kelembagaan sedangkan, yang mendominasi pemimpin adalah laki-laki. Struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang secara tersurat dan tersirat dapat menunjukkan konteks gender di dalam kepengurusan organisasi. Dari hasil temuan lapangan, dari organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan, ditemukan bahwa dari struktur organisasi tersebut yang menduduki jabatan sebagai Ketua Umum atau selaku pemimpin organisasi adalah sosok seorang laki-laki. Sedangkan peran perempuan rata-rata terletak pada posisi sekretaris dan bendahara umum. Namun untuk ketua divisi atau ketua bidang di dalam organisasi sudah terdapat sosok seorang perempuan yang menjadi ketua divisi ataupun ketua bidang di beberapa organisasi kemahasiswaan. Peran seorang perempuan masih terkesan minim dalam menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi kampus. Dari penyajian data diatas yang didasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis dapat melihat bahwa Gender dan Lembaga Kemahasiswaan Di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar sebagai berikut:

PEMBAHASAN

a. Gender Dalam Lembaga Kemahasiswaan Administrasi Pendidikan

Peneliti menemukan bahwa faktor pendukung bagi perempuan untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi yaitu perempuan biasanya lebih rajin dan teliti, cenderung rapi dalam mengerjakan persuratan, membuat rangkaian rapat, dan mahir dalam mengurus keuangan, perempuan juga cenderung cocok ditempatkan sebagai sekretaris dan bendahara. Hal ini senada diungkapkan Wahyuni dan Hidayah (2014: 6) yang memaparkan bahwa partisipasi perempuan dalam berorganisasi hanya sedikit yang terlibat dalam struktur dan dapat dipastikan posisi tersebut menempati posisi yang identik dengan stereotipe pekerjaan domestik seperti bendahara dan sekretaris. Perempuan juga berhak menduduki jabatan dan perempuan dapat menjadi pemimpin tergantung dari apakah orang tersebut mempunyai kemampuan terkait jabatan tersebut dan memenuhi persyaratan dan kriteria. Hak keterwakilan ini tertuang dalam amanat UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi : “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan,

dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.

Peneliti juga menemukan bahwa perempuan masih banyak yang menarik diri dalam partisipasi menjadi seorang pemimpin, sebagaimana tanggapan beberapa informan mengatakan mahasiswi tidak mencalon sebagai ketua umum/ketua bidang dikarena adanya ketidak mauan, kurangnya pengalaman, merasa belum mampu, kurangnya percaya diri dan merasa tidak cocok untuk menjadi pemimpin.

Hal ini senada disampaikan oleh sopiah (2011) bahwa tidak adanya pemberian atribut kepemimpinan dan kekuasaan terhadap perempuan bukan saja dilakukan oleh masyarakat pada umumnya melainkan hal tersebut juga dipengaruhi oleh perempuan itu sendiri yang tidak memberikan atribut kekuasaan kepada kaum perempuan.

Peneliti juga menemukan bahwa faktor pendukung bagi laki-laki untuk berperan menduduki jabatan dalam struktur organisasi, sebagaimana tanggapan beberapa informan mengatakan, seperti laki-laki dinilai lebih tegas dalam pengambilan keputusan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki sikap yang berani mengambil resiko dalam setiap tindakannya dan faktor lainnya yang paling mendukung adalah mereka pandai bersosialisasi untuk membangun relasi, maka dari itu laki-laki dinilai lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Sedangkan faktor pendukung laki- laki untuk berperan menduduki jabatan dalam struktur organisasi menghasilkan laki-laki di pandang lebih mampu dari segi fisik karena mampu mengerjakan pekerjaan berat karena mempunyai keberanian, otot yang besar kekar dan kuat , jiwa kesatria, pemberani, tidak baperan, dan tidak mudah tersinggung atau bawa perasaan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan (Maksum (2016:178) bahwa kenyataan dalam kehidupan sosial, laki-laki dibentuk dengan pribadi yang besar, kuat, asertif dan dominan.

b. Wujud Kesetaraan Gender Dalam Lembaga Kemahasiswaan Administrasi Pendidikan

Wujud kesetaraan gender dalam lembaga kemahasiswaan Administrasi Pendidikan dapat dilihat berdasarkan penempatan orang-orang dalam pembagian wewenang dalam struktur organisasi dan aktualisasi program kerja.

Dalam AD/ART Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan Adapun aturan lembaga yang membahas mengenai persyaratan menjadi pengurus adalah: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Loyal terhadap organisasi, Bersedia aktif menjadi pengurus, Tidak sedang kena sanksi akademik, Memiliki jiwa kepemimpinan, Lulus LDKM, Bersedia menaati AD/ART, arah kebijakan organisasi, arah juklak dan rekomendasi MUBES HIMA AP FIP

UNM , Tidak cacat organisasi, Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif AP FIP UNM, Tidak terlibat politik praktis, Minimal semester 2 Maksimal semester 6.

a) Pembagian wewenang dalam struktur organisasi

KH Husein Muhammad dalam (Zakaria 2013) menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan memimpin seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak selalu dikaitkan dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal.

Lebih lanjut Anjodah (2015: 7) yang menejelaskan bahwa sukses atau gagal yang dialami oleh organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahkan tugas memimpin dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dalam menduduki suatu jabatan didalam organisasi jenis kelamin tidak berpengaruh dalam menduduki suatu jabatan didalam struktur organisasi baik itu laki-laki maupun perempuan jika berpotensi dan memenuhi semua syarat dan kualifikasinya berarti siapapun mampu berkontribusi dalam mengambil suatu jabatan guna mencapai keberhasilan suatu organisasi.

b) Pembagian Wewenang Dalam Aktualisasi Program Kerja

Peneliti menemukan bahwa yang dipertimbangkan dalam pemilihan ketua umum yaitu pengalamannya dalam berorganisasi, hubungannya antara anggota yang dipimpinnya serta eksistensinya dalam membangun relasi dan yang bisa mengayomi, adil dan tidak memihak. Dalam pemilihan sekretaris umum sebaiknya perempuan karena perempuan lebih teliti, luwes, cepat tanggap dalam mengatur yang namanya persuratan dan administrasi lembaga karena sekretaris tidak lepas dari yang namanya ketik mengetik dan surat menyurat. Dalam pemilihan bendahara umum sebaiknya diatur oleh perempuan karena perempuan dipercaya mampu mengatur kauangan baik uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan, perempuan lebih memperhatikan hal secara mendetail, teliti dan terorganisir.

Suatu persepsi mahasiswi maupun mahasiswa yang cenderung bersifat stereotip terhadap peran-peran yang identik dengan bagian internal dalam suatu kepengurusan di organisasi seperti posisi sekretaris dan bendahara, dalam konteks gender biasa disebut dengan wilayah domestic. Hal itu pun dikarenakan sifat-sifat tersebut dianggap telah melekat di diri mahasiswi sebagai perempuan yang dapat mendukung status dan peran sebagai sekretaris dan bendahara di organisasi yang berkaitan erat dengan hal-hal administratif. Sedangkan status dan peranan sebagai seorang ketua di organisasi yang merupakan bagian wilayah publik lebih ditujukan kepada mahasiswa, hal ini dikarenakan adanya suatu persepsi yang telah melekat

pada diri mahasiswa yang diidentikan memiliki jangkauan yang luas, logis dan secara fisik mereka dianggap lebih kuat, energik dan gesit. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang merupakan hasil persepsi yang stereotip sehingga mensubordinasikan salah satu jenis kelamin sebagaimana yang diungkapkan Fakih (2013:15-21) bahwa manifestasi ketidakadilan gender adalah adanya marginalisasi perempuan dalam wilayah domestik sedangkan laki-laki ke wilayah publik sebagai akibat adanya pandangan gender yang menimbulkan subordinasi dan stereotip sehingga terbentuknya suatu kontruksi sosial terhadap penempatan perempuan di bagian internal (domestik) dan laki-laki di bagian eksternal (publik).

Berdasarkan pemaparan diatas maka pembagian wewenang dalam struktur organisasi jenis kelamin tidak berpengaruh dalam menduduki suatu jabatan, jika berpotensi dan memenuhi syarat dan kualifikasi berarti siapapun mampu berkontribusi mengambil suatu jabatan. Sedangkan pembagian wewenang aktualisasi program kerja memiliki beberapa pertimbangan dalam pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Peran-peran yang identik dengan bagian internal dalam suatu kepengurusan diorganisasi seperti sekretaris dan bendahara, perempuan dianggap dapat mendukung status dan peran tersebut, sedangkan status dan peran ketua ditujukan untuk laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan perempuan tidak bisa menduduki posisi ketua begitu pun sebaliknya posisi sekretaris dan bendahara bisa diduduki oleh laki-laki. Dalam penempatan orang-orang dalam pembagian wewenang dalam struktur organisasi dikatakan bahwa dalam menduduki suatu jabatan didalam organisasi jenis kelamin tidak berpengaruh dalam menduduki suatu jabatan didalam struktur organisasi baik itu laki-laki maupun perempuan jika berpotensi dan memenuhi semua syarat dan kualifikasinya berarti siapapun mampu berkontribusi dalam mengambil suatu jabatan guna mencapai keberhasilan suatu organisasi. Sedangkan pembagian wewenang dalam aktualisasi program kerja bahwa yang dipertimbangkan dalam pemilihan ketua umum yaitu pengalamannya dalam berorganisasi, hubungannya antara anggota yang dipimpinnya serta eksistensinya dalam membangun relasi dan yang bisa mengayomi, adil dan tidak memihak. Dalam pemilihan sekretaris umum sebaiknya perempuan karena perempuan lebih teliti, luwes, cepat tanggap dalam mengatur yang namanya persuratan dan administrasi lembaga karena sekretaris tidak lepas dari yang namanya ketik mengetik dan surat menyurat. Dalam pemilihan bendahara umum sebaiknya diatur oleh perempuan karena perempuan dipercaya mampu mengatur kauangan baik uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan, perempuan lebih memperhatikan hal secara mendetail, teliti dan terorganisir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tentang Gender dan Lembaga Kemahasiswaan Di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun Akademik 2020/2021, Dari hasil temuan lapangan, ditemukan bahwa: Gender tidak menjadi syarat dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi jika berpotensi dan memenuhi semua syarat dan kuliafikasinya. Persepsi mahasiswa dan mahasiswi cenderung bersifat stereotip terhadap peran-peran yang identik dengan bagian internal dalam suatu kepengurusan diorganisasi. Laki-laki dianggap lebih pantas sebagai seorang pemimpin dan perempuan dianggap lebih pantas sebagai sekretaris dan bendahara. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih tegas dalam mengambil keputusan, memiliki jiwa kepemimpinan, tidak sensitif dan berani mengambil resiko. Sedangkan perempuan dianggap rajin, teliti, rapi, dan mahir dalam mengurus keuangan. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak sebagai anggota organisasi, tetapi yang menjadi ketua selalu laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai sekretaris dan bendahara. Mahasiswi memilih untuk tidak mencalonkan sebagai pemimpin dan menarik diri dalam partisipasi menjadi pemimpin karena memang tidak bersedia, merasa kurang pengalaman, merasa belum mampu, kurang percaya diri, dan merasa tidak cocok untuk menjadi pemimpin.

REFERENSI

- Anjodah, Novechi. 2015. “kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.” *Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pindang, Naska Publikasi, Kepulauan Riau*.
- Antares P, R. 2019. “Perbedaan otak pria vs wanita.”2019.<https://www.tagar.id/perbedaan-otak-pria-vs-wanita>.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Dermanto, Argyo. 2007. *Menyibak Sensitivitas gender dalam keluarga difabel*. Surakarta :UNS Press.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1406/UN36?KM/2017 Tentang Peraturan Krmahasiswaan Universitas Negeri Makassar. Makassar : Universitas Negeri Makassar.
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1406/UN36?KM/2017 Tentang Peraturan Krmahasiswaan Universitas Negeri Makassar Pasal 2. Makassar : Universitas Negeri Makassar.

- kusdi. (2009). *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta : Selembah Humanika.
- Maksum, Ali. 2016. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: Madani.
- Nalien Haspels & Busakorn Surisarn. 2005. *Meningkatkan kesetaraan gender*. Jakarta: Perburuhan Internasional.
- Padang, Ainul Yakin D. 2017. Peran Organisasi Internal Kampus Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Akademik 2016/2017
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.
- sopiah, pipih. 2011. *Inspirasi Untuk Perempuan Berpolitik*. bandung: CV Bangkit Citra Persada.
- Wahyuni, S & Hidayah, N. (2014). Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Kabupaten Palalawan (IPMP-KP) di yogyakarta.
- Zakaria, Samsul. 2013. “kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam (studi kooperatif antara pemikiran KH Husein Muhammad dan Prof Siti Musdah Mulia).” *Khazanah* vol 6 no 1.